

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
INSPEKTORAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	8
BAB III	9
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	9
3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD	9
3.1.1. Pendapatan - LRA	9
3.1.2. Belanja	9
3.1.3. Pendapatan - LO	10
3.1.4. Beban - LO	10
3.1.5. Aset	11
3.1.6. Kewajiban	14
3.1.7. Ekuitas Dana	15
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	15
BAB IV	15
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	16
BAB V	25
PENUTUP	26

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Inspektorat sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD |
| BAB IV | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V | : PENUTUP |

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam merealisasikan alokasi belanja untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2023 dan telah melakukan perubahan APBD dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023. Inspektorat Kabupaten Temanggung telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran sehingga diperoleh anggaran akhir sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Ringkasan Perubahan APBD
Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
61	INSPEKTORAT DAERAH	6,622,639,197	7,034,307,890	411,668,693
60101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,854,207,597	6,237,876,290	383,668,693
60101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,465,382,704	5,821,312,597	355,929,893
6010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,455,382,704	5,811,312,597	355,929,893
6010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10,000,000	10,000,000	-
60101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000	10,088,000	(912,000)
6010120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000	19,088,000	(912,000)
60101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172,830,000	186,330,300	13,500,300
6010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000	2,000,000	-
6010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,000,000	20,609,500	(4,390,500)
6010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,000,000	34,000,000	(1,000,000)
6010120608	Fasilitas Kunjungan Tamu	42,830,000	18,790,000	(24,040,000)
6010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68,000,000	110,930,800	42,930,800
60101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119,999,893	121,852,000	1,852,107
6010120705	Pengadaan Mebel	29,999,893	26,804,800	(3,195,093)
6010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90,000,000	95,047,200	5,047,200
60101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,999,000	6,498,000	(2,500,000)
6010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	2,500,000	(2,500,000)
6010120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,999,000	3,999,000	-
60101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66,996,000	82,794,393	15,798,393
6010120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,000,000	75,798,393	15,798,393
6010120905	Pemeliharaan Mebel	2,496,000	2,496,000	-
6010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,500,000	4,500,000	-
60102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	468,715,600	466,437,600	(2,278,000)
60102201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	418,715,600	408,437,600	(10,278,000)
6010220101	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7,999,900	7,999,900	-
6010220103	Revisi Laporan Kinerja	110,000,000	99,722,000	(10,278,000)
6010220104	Revisi Laporan Keuangan	80,000,000	80,000,000	-
6010220105	Pengawasan Desa	85,000,000	85,000,000	-
6010220107	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeksaan APIP	135,715,700	135,715,700	-
60102202	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50,000,000	58,000,000	8,000,000
6010220201	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	11,000,000	11,000,000	-
6010220202	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	39,000,000	47,000,000	8,000,000
60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	299,716,000	329,994,000	30,278,000
60103201	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	36,000,000	46,278,000	10,278,000
6010320101	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	36,000,000	46,278,000	10,278,000
60103202	Pendampingan dan Asistensi	263,716,000	283,716,000	20,000,000
6010320203	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	230,716,000	250,716,000	20,000,000
6010320204	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33,000,000	33,000,000	-

Adapun perubahan tersebut terdiri dari :

1. Penambahan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan penambahan CPNS PKN STAN sejumlah 5 orang, penambahan 2 orang PP2UPD dan diberikannya tambahan penghasilan bagi CPNS Angkatan tahun 2021 yang telah berubah statusnya menjadi PNS;
2. Penambahan anggaran dan penambahan dari pergeseran anggaran lain untuk rekening perjalanan dinas kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dikarenakan anggaran tersebut telah habis namun masih banyak kegiatan dan rakor luar kota;
3. Penambahan BBM untuk kegiatan rutin dan pengawasan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan karena anggaran sebelumnya telah habis;
4. Penambahan sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu untuk honorarium pemberi keterangan saksi ahli dalam persidangan tipikor dan untuk mendukung kegiatan audit dalam klarifikasi lapangan;
5. Penambahan sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Adanya mandatori MCP KPK yang mewajibkan sosialisasi anti korupsi kepada:
 - a) Legislatif
 - b) Penyelenggara Negara (Kades beserta perangkat)
 - c) Kepala OPD dan Jajaran, dan masyarakat yang terdiri atas pelaku usaha, CSO, media massa dan masyarakat yang diwakili oleh Ketua RW dan Tokoh masyarakat.

Dalam hal ikhtisar pencapaian target keuangan, Anggaran Kinerja Pemerintah pada prinsipnya hanya meliputi 1 komponen pokok yaitu komponen belanja. Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah sehingga Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak memiliki maupun mengelola komponen pendapatan daerah baik yang bersumber dari APBD maupun PAD Lainnya serta tidak memiliki komponen pembiayaan.

Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2023 merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD dengan

realisasinya, perbandingan tersebut akan ditampilkan dalam Tabel 2.1.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih	Selisih %
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	7.034.307.890,00	6.941.509.473,00	(92.798.417,00)	(1,32)
51	BELANJA OPERASI	6.912.955.890,00	6.821.943.173,00	(91.012.717,00)	(1,32)
5101	Belanja Pegawai	5.811.812.597,00	5.793.105.427,00	(18.707.170,00)	(0,32)
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.034.722.521,00	3.018.999.802,00	(15.722.719,00)	(0,52)
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.776.590.076,00	2.773.605.625,00	(2.984.451,00)	(0,11)
510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5102	Belanja Barang dan Jasa	1.101.143.293,00	1.028.837.746,00	(72.305.547,00)	(6,57)
510201	Belanja Barang	332.909.593,00	300.610.516,00	(32.299.077,00)	(9,70)
510202	Belanja Jasa	412.220.400,00	386.135.570,00	(26.084.830,00)	(6,33)
510203	Belanja Pemeliharaan	17.126.800,00	15.464.250,00	(1.664.550,00)	(9,72)
510204	Belanja Perjalanan Dinas	338.884.500,00	326.627.410,00	(12.257.090,00)	(3,62)
52	BELANJA MODAL	121.352.000,00	119.566.300,00	(1.785.700,00)	(1,47)
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.352.000,00	119.566.300,00	(1.785.700,00)	(1,47)
520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.027.000,00	42.241.300,00	(1.785.700,00)	(4,06)
520210	Belanja Modal Komputer	77.325.000,00	77.325.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	7.034.307.890,00	6.941.509.473,00	(92.798.417,00)	(1,32)
	Surplus (Defisit)	(7.034.307.890,00)	(6.941.509.473,00)	6.941.509.473,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(7.034.307.890,00)	(6.941.509.473,00)	6.941.509.473,00	

Dalam pelaksanaan APBD tahun 2023 realisasi belanja Inspektorat Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 6.941.509.473,00 atau 98,68% dari total anggaran yang ditetapkan. Untuk realisasi anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Laporan Realisasi Anggaran per
Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih	Selisih %
601601000000010001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.237.876.290,00	6.187.526.797,00	50.349.493,00	(0,81)
601601000000010001202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.821.312.597,00	5.802.600.427,00	18.712.170,00	(0,32)
60160100000001000120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.811.312.597,00	5.792.605.427,00	18.707.170,00	(0,32)
60160100000001000120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000,00	9.995.000,00	5.000,00	(0,05)
601601000000010001205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.088.000,00	18.841.800,00	246.200,00	(1,29)
60160100000001000120509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.088.000,00	18.841.800,00	246.200,00	(1,29)
601601000000010001206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.330.300,00	161.206.004,00	25.124.296,00	(13,48)
60160100000001000120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	1.984.000,00	16.000,00	(0,80)
60160100000001000120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.609.500,00	14.954.000,00	5.655.500,00	(27,44)
60160100000001000120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	26.057.300,00	7.942.700,00	(23,36)
60160100000001000120608	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.790.000,00	16.445.085,00	2.344.915,00	(12,48)
60160100000001000120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.930.800,00	101.765.619,00	9.165.181,00	(8,26)
601601000000010001207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.852.000,00	120.066.300,00	1.785.700,00	(1,47)
60160100000001000120705	Pengadaan Mebel	26.804.800,00	25.941.300,00	863.500,00	(3,22)
60160100000001000120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.047.200,00	94.125.000,00	922.200,00	(0,97)
601601000000010001208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.499.000,00	6.431.400,00	67.600,00	(1,04)
60160100000001000120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.487.000,00	13.000,00	(0,52)
60160100000001000120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.999.000,00	3.944.400,00	54.600,00	(1,37)
601601000000010001209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.794.393,00	78.380.866,00	4.413.527,00	(5,33)
60160100000001000120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.796.393,00	71.445.866,00	4.352.527,00	(5,74)
60160100000001000120905	Pemeliharaan Mebel	2.496.000,00	2.475.000,00	21.000,00	(0,84)
60160100000001000120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	4.460.000,00	40.000,00	(0,89)
601601000000010002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	466.437.600,00	446.365.155,00	20.052.445,00	(4,30)
601601000000010002201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	408.437.600,00	390.346.625,00	18.090.975,00	(4,43)
60160100000001000220101	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7.999.900,00	6.702.000,00	1.297.900,00	(16,22)
60160100000001000220103	Revisi Laporan Kinerja	99.722.000,00	99.428.280,00	293.720,00	(0,29)
60160100000001000220104	Revisi Laporan Keuangan	80.000.000,00	78.185.750,00	1.814.250,00	(2,27)
60160100000001000220105	Pengawasan Desa	85.000.000,00	81.239.894,00	3.760.106,00	(4,42)
60160100000001000220107	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	135.715.700,00	124.790.701,00	10.924.999,00	(8,05)
601601000000010002202	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	56.000.000,00	56.038.530,00	(38.530,00)	(0,07)
60160100000001000220201	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah	11.000.000,00	10.707.580,00	292.420,00	(2,66)
60160100000001000220202	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	47.000.000,00	45.330.950,00	1.669.050,00	(3,55)
601601000000010003	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	329.994.000,00	307.597.521,00	22.396.479,00	(6,79)
601601000000010003201	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	46.278.000,00	41.869.900,00	4.408.100,00	(9,53)
60160100000001000320101	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	46.278.000,00	41.869.900,00	4.408.100,00	(9,53)
601601000000010003202	Pendampingan dan Asistensi	283.716.000,00	265.727.621,00	17.988.379,00	(6,34)
60160100000001000320203	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	250.716.000,00	237.512.121,00	13.203.879,00	(5,27)
60160100000001000320204	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33.000.000,00	28.215.500,00	4.784.500,00	(14,50)
	Jumlah	7.034.307.890,00	6.941.509.473,00	92.798.417,00	(1,32)

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapan

Pada tahun 2023 hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target adalah proses penyerapan anggaran. Dimana hal tersebut terjadi karena DPA Perubahan disahkan pada akhir bulan Oktober sehingga pelaksanaan kegiatan untuk penyerapan anggaran baru bisa dilaksanakan pada awal bulan November.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Seperti yang dijelaskan pada Bab II Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah sehingga Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak memiliki maupun mengelola pendapatan daerah baik yang bersumber dari APBD maupun PAD Lainnya.

3.1.2. Belanja

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas Belanja operasi, Belanja modal, Belanja tidak terduga; dan Belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Pada tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki klasifikasi belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja operasi Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah Rp.6.941.509.473,00 dari total anggaran senilai Rp.7.034.307.890,00 atau 98,68%. Realisasi belanja operasi sendiri terbagi menjadi dua jenis rincian yaitu belanja pegawai sebesar Rp.5.793.105.427,00 atau 99,68% dari total anggaran belanja pegawai sebesar Rp.5.811.812.597,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.1.028.837.746,00 atau 93,43% dari total anggaran belanja barang jasa sebesar Rp.1.101.143.293,00. Sedangkan realisasi belanja modal tanpa BOP adalah sebesar Rp.119.566.300,00 atau 98,53% dari total anggaran Rp.121.352.000,00. Sisa anggaran sebesar 1,32% terdiri dari sisa anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.50.349.493,00 yang merupakan anggaran yang bersifat penyediaan sehingga belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk sisa anggaran Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp.20.052.445,00 dan program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi sebesar Rp.22.396.479,00 merupakan akumulasi dari

beberapa sisa Sub Kegiatan per program, namun demikian sasaran kinerja telah tercapai 100%.

3.1.3. Pendapatan - LO

Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan instansi yang bertugas sebagai pengawas sehingga tidak mengelola pendapatan.

3.1.4 Beban - LO

Menurut PSAP 12 tentang Laporan Operasional Klasifikasi ekonomi beban LO untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban tak terduga.

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban LO adalah Beban yang merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 (satu) tahun, beban tersebut tidak termasuk pembayaran barang/ jasa pada tahun sebelumnya. Beban LO Inspektorat Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Beban Laporan Operasional
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
	Jumlah Pendapatan	0,00
8	BEBAN DAERAH	6.992.121.397,29
81	BEBAN OPERASI	6.992.121.397,29
8101	Beban Pegawai	5.863.075.277,00
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.018.999.802,00
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.844.075.475,00
8102	Beban Barang dan Jasa	1.030.157.145,00
810201	Beban Barang	301.929.916,00
810202	Beban Jasa	386.135.570,00
810203	Beban Pemeliharaan	15.464.250,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	326.627.410,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	98.888.974,29
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	98.888.974,29
	Jumlah Beban	6.992.121.397,29
	Surplus Defisit LO	(6.992.121.397,29)

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai per 1 Januari 2023 sd 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp.5.863.075.277,00. Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual yaitu pengakuan beban

pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2023.

b. **Beban Barang dan Jasa**

Beban barang dan jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.030.157.146,00 merupakan jumlah barang dan jasa Tahun 2023 dikurangi dengan belanja barang dan jasa yang dikapitaliasi menjadi aset dan tidak termasuk pembayaran atas belanja barang dan jasa tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah persediaan pada Tahun 2023.

c. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2023 sebesar Rp.98.888.974,29. Beban amortisasi merupakan nilai pengurangan atau penurunan nilai dari aktiva yang tidak berwujud. Sedangkan Beban penyusutan adalah biaya penyusutan dalam suatu aset berwujud dikarenakan adanya penurunan nilai manfaat ekonomi.

3.1.5 **Aset**

A. **Aset Lancar**

1. **Kas dan Setara Kas**

a. Kas di Bank	Rp. 0.00,-
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>Rp. 0.00,-</u>
Jumlah	Rp. 0.00,-

Saldo kas dan setara kas pada Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Temanggung baik kas di bank maupun kas tunai pada akhir tahun telah disetor seluruhnya pada rekening Kas Daerah. Sehingga saldo kas per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0.00

2. **Persediaan**

Akun persediaan menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Setelah dilakukan perhitungan oleh pejabat pengurus barang maka diperoleh jumlah sisa bahan pakai habis per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Persediaan per 31 Desember 2023
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
111201030001	Alat Tulis Kantor	3.002.000
111201030002	Kertas dan Cover	2.567.000
111201030003	Bahan Cetak	16.523.500
111201030004	Benda Pos	920.000
111201030006	Bahan Komputer	3.574.000
111201030013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	236.000
Total		26.822.500

B. Aset Tetap

Pada tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Temanggung melaksanakan belanja modal include BOP sebesar Rp.120.066.300,00 berupa 2 buah lemari arsip pintu geser, 1 buah lemari arsip 2 pintu, 1 unit printer brother DCP T720DW, 4 unit printer epson L3250 ecotank, 2 unit komputer PC AIO acer C22-1700, 3 unit notebook AXIOO Mybook Pro K5, 13 buah kursi kerja, 1 unit mesin penghancur kertas, 3 buah kursi hadap, 1 buah kursi kerja pimpinan, 1 unit AC Daikin 2 PK dan 1 unit alat pemadam kebakaran. Selain itu Inspektorat Kabupaten Temanggung menghibahkan Mobil Kijang senilai Rp.65.000.000,00 kepada Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung sesuai Keputusan Pengelola Barang Nomor 028.1/1265 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Kabupaten Temanggung Dari Daftar Barang Pengguna Pada Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023, sehingga jumlah aset per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1302	Peralatan dan Mesin	2.244.705.805,00
1305	Aset Tetap Lainnya	25.669.600,00
504	Aset Lain-lain	11.670.000,00
JUMLAH ASET TETAP		2.282.045.405,00

Akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin tahun sebelumnya sebesar Rp.2.040.471.515,71 dikurangi akumulasi penyusutan aset yang dihapuskan sebesar Rp.65.000.000,00 sehingga diperoleh akumulasi aset

final sebesar Rp.1.975.471.515,71. Penyusutan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.98.888.974,29 maka diperoleh akumulasi penyusutan pada akhir tahun sebesar Rp. 2.074.360.490,00. Nilai buku aset dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Akumulasi Penyusutan Aset
Inspektorat Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2023

Uraian	Harga Perolehan Aset Tahun 2022	Belanja Modal Tahun 2023 (include BOP)	Harga Perolehan Aset Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan Aset s.d Tahun 2022	Beban Penyusutan Tahun 2023	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	2.124.639.505,00	120.066.300,00	2.244.705.805,00	1.975.471.515,71	98.888.974,29	170.345.315,00
alat angkutan	1.115.578.595,00	-	1.115.578.595,00	1.098.337.880,71	17.240.714,29	0
alat kantor dan rumah tangga	488.471.410,00	42.441.300,00	530.912.710,00	438.631.910,00	23.991.560,00	68.289.240,00
alat studio, komunikasi dan pemancar	19.304.000,00	-	19.304.000,00	17.944.000,00	1.160.000,00	200.000,00
alat kedokteran dan kesehatan	2.033.500,00	-	2.033.500,00	1.220.100,00	406.700,00	406.700,00
alat laboratorum	38.420.000,00	-	38.420.000,00	12.652.500,00	2.772.500,00	22.995.000,00
komputer	460.832.000,00	77.625.000,00	538.457.000,00	406.685.125,00	53.317.500,00	78.454.375,00
Aset Tetap Lainnya	25.669.600,00	-	25.669.600,00	-	-	25.669.600,00
bahan perpustakaan	25.669.600,00	-	25.669.600,00	-	-	25.669.600,00
Aset Lain-lain	11.670.000,00	-	11.670.000,00	11.670.000,00	-	-
aset lain-lain	11.670.000,00	-	11.670.000,00	11.670.000,00	-	-
Jumlah Nilai Buku Aset per Akhir tahun 2023	2.161.979.105,00	120.066.300,00	2.282.045.405,00	1.987.141.515,71	98.888.974,29	196.014.915,00

C. Barang Ekstrakomptabel

Aset tetap yang nilainya dibawah batas materialitas aset dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB). Daftar barang ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalis. Berikut daftar barang ekstrakomptabel pada akhir tahun 2023 :

Tabel 3.5
Barang Ekstrakomptabel
Inspektorat Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Alat Pemeriksa Beton	350.000
2	Audio Tape Reel Recorder	250.000
3	Bingkai Foto	290.000
4	Camera	325.000
5	Cermin kaca	450.000
6	Chopping board	36.500
7	Dispenser	745.000
8	Ember	45.800
9	Filing kabinet	2.190.000
10	Flashdisk	747.000
11	Gelas	249.600
12	jam dinding	150.000
13	kabel printer	120.000
14	Kalkulator	240.000
15	karpas	185.000
16	Kipas Angin	4.250.000
17	Kompas Gas (alat Dapur)	375.000
18	Kursi Lipat	11.100.000
19	kursi putar	2.375.000
20	Kursi Rapat	14.082.000
21	kursi tangan	600.000
22	Lambang Garuda Pancasila	375.000
23	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	225.000
24	Lemari Kayu	400.000
25	Lemari Sorok	250.000
26	Mangkuk Sup	250.000
27	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	900.000
28	Meja Komputer	400.000
29	Meja Tamu Biasa	3.125.000
30	Meja Telepon	750.000
31	Mesin Penghisap Debu/vacuum Cleaner	386.500
32	Mouse	100.000
33	Mouse pad	7.000
34	Panci	1.000.000
35	Papan Acara	100.000
36	papan struktur	100.000
37	Peta Temanggung	150.000
38	Piring	192.000
39	Piring ceper	684.000
40	Power Supplay	625.000
41	Rak dorong	600.000
42	Rak kayu	60.000
43	Rak Piling Aluminium	300.000
44	Sendok makan	132.000
45	tabung gas	150.000
46	taplak	140.000
47	Tea set	204.000
48	Teko	343.000
49	Toples	172.800
50	Tutup gelas	8.000
	Total	51.285.200

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pada tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Temanggung

hanya memiliki kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Pada akhir tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki kewajiban sebagai berikut :

Tabel 3.6
Daftar Kewajiban/ Hutang
Inspektorat Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2023

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
210601020001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	237.668.050
210602020026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	4.000.000
210602020033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	1.750.000
JUMLAH HUTANG		243.418.050

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas memiliki pengertian sebagai selisih nilai antara nilai aset dengan liabilitas atau kewajiban. Pada akhir tahun 2023 jumlah aset Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebesar Rp.222.837.415,00 sedangkan kewajiban sebesar Rp.243.418.050,00 sehingga nilai ekuitas akhir adalah sebesar (Rp.20.580.635,00).

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

Tidak ada pengungkapan lain atas pos pos belanja

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Inspektorat Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung. Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Peran APIP yang efektif sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***assurance activities***)
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***anti corruption activities***)

- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*cosulting activities*)

Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki kegiatan :

A Kegiatan Utama

1. Pengawasan :

- a. Pemeriksaan Reguler dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas/kewenangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada komponen yang meliputi :

- Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
- Aspek Pengelolaan Barang Daerah.

- b. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi atau pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.

- c. Pemeriksaan Khusus dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang.

- d. Pemeriksaan Tematik adalah pemeriksaan pada tema atau fokus tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menilai efektifitas, efisiensi dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Reviu atas Laporan Keuangan;

3. Monitoring dan Evaluasi;

4. Sosialisasi dan Asistensi;

5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

6. Sosialisasi dan fasilitasi penyusunan LHKPN dan LHKASN;

7. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Gelar Pengawasan.

B. Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Temanggung :

1. Mengawal reformasi birokrasi;
2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulanan.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
6. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
7. Pendampingan Kegiatan Zona Integritas;
8. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4227/SJ/;
9. Kegiatan pelayanan konsultasi bagi Organisasi Perangkat Daerah dan desa.

C. Kegiatan Penunjang

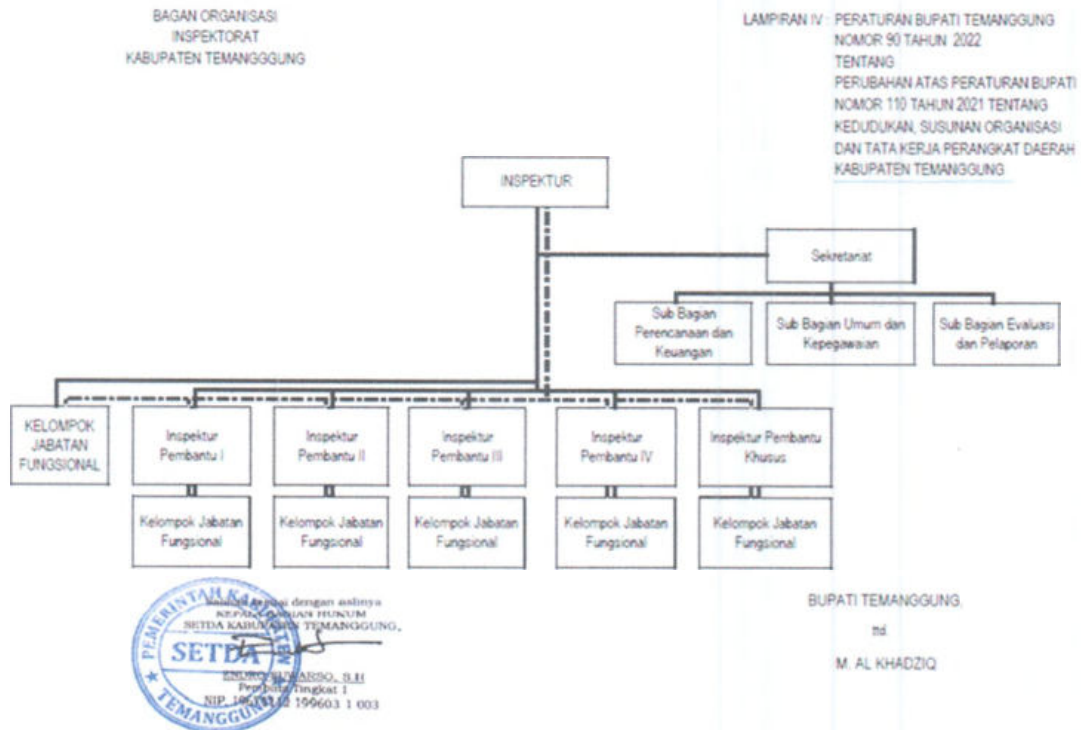
1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
3. Kegiatan Kesekretariatan;
4. Penerbitan Koreksi Intern.

D Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, maka dibentuk struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar IV.1
BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



Uraian tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Inspektur mempunyai fungsi:

- ❖ perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- ❖ pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- ❖ penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- ❖ penyusunan laporan hasil pengawasan;
- ❖ pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- ❖ pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- ❖ pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- ❖ pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat memiliki tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat. Sekretariat mempunyai fungsi:

- ❖ penyiapan bahan dan data dalam rangka kegiatan dan pembinaan teknis fungsional di lingkungan Inspektorat;
- ❖ pengoordinasian, penyusunan dan pengendalian rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- ❖ penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;
- ❖ penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat;
- ❖ penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi di lingkungan Inspektorat.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, Evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbag perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- ❖ menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- ❖ menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- ❖ menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- ❖ menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;

- ❖ menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- ❖ menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- ❖ menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- ❖ menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- ❖ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbag Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- ❖ menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- ❖ menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- ❖ menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat;

- ❖ menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- ❖ menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- ❖ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, menghimpun, mengolah, melaksanakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan, meliputi:

- ❖ menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang evaluasi dan pelaporan;
- ❖ menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- ❖ menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- ❖ menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- ❖ mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- ❖ menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
- ❖ menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- ❖ menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten;
- ❖ menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- ❖ menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP;
- ❖ menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah;
- ❖ menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas pengawasan internal terhadap kinerja, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan pemerintahan Daerah;
- ❖ pelaksanaan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
- ❖ pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- ❖ pelaksanaan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ❖ pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang pemerintahan daerah;
- ❖ pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- ❖ pelaksanaan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- ❖ pelaksanaan Reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan monitoring dan Evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal pada Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah; dan
- ❖ pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

4. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pengawasan internal terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- ❖ pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan reformasi birokrasi;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang reformasi birokrasi;
- ❖ pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang reformasi birokrasi;
- ❖ pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- ❖ pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi;

- ❖ pelaksanaan pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- ❖ pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
- ❖ pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;
- ❖ pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- ❖ pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan LHKPN;
- ❖ pelaksanaan verifikasi LHKASN;
- ❖ pengoordinasian kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- ❖ pelaksanaan penilaian zona integritas;
- ❖ pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi; dan
- ❖ pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

5. Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
- ❖ pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
- ❖ pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
- ❖ pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
- ❖ pelaksanaan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi;
- ❖ pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- ❖ pelaksanaan reviu dana alokasi khusus fisik;
- ❖ pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
- ❖ pelaksanaan reviu dan audit dana Bantuan Operasional Sekolah;
- ❖ pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah bantuan sosial;
- ❖ pelaksanaan audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah; dan
- ❖ pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

6. Inspektur Pembantu IV

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal Bidang Kinerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan pembinaan pengawasan;

- ❖ pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bidang Kinerja Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan audit pelayanan publik Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan audit kinerja Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- ❖ pelaksanaan audit kinerja Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- ❖ pelaksanaan audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa;
- ❖ pelaksanaan audit kinerja, Dana Desa/Keuangan Desa dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- ❖ pelaksanaan konsultasi kepada Pemerintahan Desa;
- ❖ pelaksanaan audit kinerja pengelolaan aset daerah; dan
- ❖ pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

7. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu. Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
- ❖ pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan khusus;
- ❖ pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
- ❖ pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- ❖ pelaksanaan audit atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- ❖ pelaksanaan audit atas pelanggaran kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- ❖ pelaksanaan probity audit;
- ❖ pelaksanaan audit investigasi;
- ❖ pelaksanaan audit forensik;
- ❖ pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- ❖ pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang didalamnya melaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan; ;
2. Penjelasan pos – pos laporan keuangan;
3. Penjelasan atas informasi non keuangan.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV diatas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, serta Pemerintah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 10 Januari 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. KRISTRI WIDODO,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005